

Masdiyan Putri

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Email: masdiyanputri@gmail.com

Zuly Qodir

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: zuli@yahoo.com

<https://doi.org/10.18196/jgpp.4174>

**Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim
dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2015****ABSTRACT**

Regional head election (Election), which aims at selecting the regent and deputy regent is one part of the mechanism of democracy, became the main gate in building leadership in the area. Bantul regency simultaneously implement the first election on December 9, 2015, followed by two pairs of candidates, namely Suharsono-Abdul Halim Musleh (Suharsono-Halim) promoted by a coalition of PKB, Gerindra, and supported by the PKS and the Democratic Party. Another couple is Sri Suryawidati-Misbakhul Munir (Ida-Munir) promoted by a coalition of the PDI-P, Nasdem and supported by Golkar and PPP. Based on the results of counting of votes at the General Election 2015 Bantul regency, the victory won by the couple Suharsono-Halim with a tally of 261 412 valid votes, or 52.80%. The problem underlying this study is that the defeat of the incumbent against the new candidate, their political issues couples dolls, as well as their political dynasty that occurred in the district of Bantul. This study aims to identify factors that influence Suharsono-Halim victory in the election district of Bantul in 2015. This study used a qualitative descriptive method, where data collection techniques using interviews, and documentation. Sampling using purposive sampling, where the speakers who will be interviewed are selected based considerations and an informant competent to answer questions researchers. The results of this study the expression of that factor Suharsono win-Halim coalition partner in the election in Bantul district in 2015 was influenced by three factors. The first coalition of political parties, which the coalition used is minimal coalition victory. Both political participation, community involvement Bantul in granting voting rights in the election in 2015 increased compared to the election in 2010 and the highest among the Gunung Kidul and Sleman districts, which also carry out the election. The third modality, this modality consists of political capital, social capital, cultural capital and economic capital. Political capital owned by Suharsono-Halim ie a split in the opposite camp, the strength of the network owned, as well as the utilization of the existing political issues, while the socially owned capital as a base period, figures figures, the trust of the community. For cultural capital owned by the couple in the form of titles and social strata owned, as well as for economic capital have is that in political funds gained from internal party coalition, volunteers, as well as from the candidate regent and deputy regent. This proves that the factor-Halim Suharsono coalition victory in the 2015 election Bantul district is the result of cooperation of various parties, namely the performance of the coalition of political parties, as well as community involvement in high political participation and modalities owned.

Keywords: Coalition, Modality, Election, Political Participation

ABSTRAK

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang bertujuan memilih Bupati dan Wakil bupati merupakan salah satu bagian dari mekanisme demokrasi, menjadi gerbang utama dalam membangun kepemimpinan di daerah. Kabupaten Bantul melaksanakan pemilukada serentak pertama pada tanggal 9 Desember 2015 yang diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni Suharsono-Abdul Halim Muslih (Suharsono-Halim) yang diusung oleh koalisi PKB, Partai Gerindra, dan di dukung oleh PKS dan Partai Demokrat. Pasangan lain ialah Sri Suryawidati-Misbakhul Munir (Ida-Munir) yang diusung oleh koalisi PDI-P, Nasdem dan didukung oleh partai Golkar dan PPP. Berdasarkan hasil penghitungan suara pada Pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015, kemenangan diraih oleh pasangan Suharsono-Halim dengan jumlah perolehan sebesar 261.412 suara sah atau 52,80%. Permasalahan yang mendasari penelitian ini ialah adanya kekalahan dari pihak petahana yang melawan calon baru, adanya isu politik pasangan boneka, serta adanya dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan Suharsono-Halim dalam pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif, dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dan dokumentasi.

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dimana narasumber yang akan di wawancarai dipilih berdasarkan pertimbangan dan merupakan informan yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan peneliti. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa faktor kemenangan koalisi pasangan Suharsono-Halim pada pemilukada di Kabupaten Bantul tahun 2015 dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama koalisi partai politik, dimana koalisi yang digunakan ialah koalisi kemenangan minimal. Kedua partisipasi politik, keterlibatan masyarakat Bantul dalam pemberian hak suara pada pemilukada tahun 2015 meningkat dibanding pemilukada tahun 2010 dan tertinggi diantara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman yang juga melaksanakan pemilukada. Ketiga modalitas, modalitas ini terdiri dari modal politik, modal sosial, modal budaya dan modal ekonomi. Modal politik yang dimiliki oleh Suharsono-Halim yakni adanya perpecahan di kubu lawan, kuatnya jaringan yang dimiliki, serta pemanfaatan isu politik yang ada, sedangkan modal sosial yang dimiliki seperti basis masa, figur tokoh, kepercayaan dari masyarakat. Untuk modal budaya yang dimiliki oleh pasangan ini berupa gelar dan strata sosial yang dimiliki, serta untuk modal ekonomi yang di miliki ialah dana politik yang diraih dari internal koalisi partai, relawan, maupun dari pasangan calon bupati dan wakil Bupati. Hal ini membuktikan bahwa faktor kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, yakni kinerja koalisi partai politik, serta keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik yang tinggi dan modalitas yang dimiliki

Kata Kunci : Koalisi, Modalitas, Pemilukada, Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan politik di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat, diawali dengan politik pada era orde baru yang bersifat sentralistik dan otoriter hingga era reformasi yang bersifat demokrasi, dimana adanya pemberian kebebasan seluas-luasnya untuk berpendapat dan membuat kelompok. Pesatnya perkembangan pemilu di Indonesia juga dapat dirasakan hingga ke level pemerintah daerah. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab IV mengatur bagaimana penentuan kepala daerah yang berbunyi Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Undang-undang ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, Pilkada tersebut dilaksanakan semata-mata bertujuan untuk menentukan pemimpin daerah yang berkualitas, amanah, akuntabel dan mengutamakan

kepentingan rakyat di daerahnya. Pemilukada serentak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 merupakan kebijakan baru yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilukada di Indonesia.

Pemilukada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diikuti oleh 3 kabupaten yakni di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman. Pilkada di Kabupaten Bantul hanya diikuti oleh 2 pasangan calon kepala daerah, yakni Suharsono-Abdul Halim Muslih (Suharsono-Halim) yang diusung oleh partai PKB, Partai Gerindra serta didukung oleh PKS dan Partai Demokrat. Sedangkan pasangan pesaing ialah Sri Suryawidati dan wakilnya Misbakhul Munir (Ida-Munir) yang diusung oleh koalisi PDI-P, Nasdem serta didukung oleh partai Golkar.

Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bantul pada awalnya dikhawatirkan mengalami kemunduran, karena menjelang berakhirnya masa pendaftaran kepala daerah hanya ada satu pasangan saja yang sudah yakin mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati yakni pasangan Ida-Munir. Majunya pasangan Suharsono-Halim ini mampu memupuskan kekhawatiran tertundanya pilkada di Kabupaten Bantul, meskipun begitu majunya pasangan Suharsono-Halim tidak terlepas dari rumor yang tidak baik, pasangan ini dianggap sebagai calon boneka yang sengaja dimunculkan oleh kubu pasangan Ida-Munir.

Dari hasil pemilukada yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun 2015, kemenangan diraih oleh Koalisi pasangan Harsono-Halim dengan suara terbanyak yaitu sebesar 261.412 suara

atau 52,8%. Sedangkan perolehan suara koalisi pasangan pesaing yaitu pasangan Ida-Munir sebesar 233.677 suara atau 47,2%. Hasil kemenangan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Hasil Suara Pemilukada Kabupaten Bantul
Tahun 2015

No	Pasangan Calon	Partai Koalisi	Hasil Suara	(%)
1	Suharsono-Abdul Halim Muslih (Suharsono- Halim)	PKB, PKS, Partai Gerindra Partai Demokrat.	261.412	52,8
2	Sri Suryawidati- Misbakhul Munir (Ida- Munir)	PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar.	233.677	47,2

Perolehan suara pada pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Bantul ini cukup mengejutkan masyarakat dan pihak lawan (Ida-Munir), karena pihak lawan merasa koalisi yang mengukung pasangannya merupakan Koalisi yang memiliki basis masa cukup banyak di Kabupaten Bantul. Pasangan petahana ini juga dikalahkan oleh pendatang baru yang merupakan purnawirawan dari kepolisian, dimana AKBP Suharsono tidak pernah sama sekali menempati posisi jabatan struktural (jabatan dalam pemerintahan) maupun jabatan politik di sebuah partai berbeda dengan wakilnya yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB.

Pada hasilnya pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 membuktikan bahwa kemenangan tidak berada di posisi Ida-Munir melainkan berada pada kubu Suharsono-Halim. Salah satu fenomena lain yang akrab di masyarakat Kabupaten Bantul yakni adanya politik dinasti, dimana dalam beberapa periode terakhir kepemimpinan bupati Bantul di pegang oleh sebuah keluarga dengan partai tunggal sebagai satu-satunya partai pendukungnya. Namun pada pemilukada pada Kabupaten Bantul tahun 2015 ini politik dinasti tersebut

berhasil terhenti dengan kemenangan pasangan purnawirawan polri yakni Suharsono-Halim mengalahkan pasangan petahana yakni Ida-Munir. Hasil pemilukada di Kabupaten Bantul tahun 2015 ini membuat peneliti tertarik ingin melakukan penelitian terkait faktor kemenangan koalisi partai politik yang mengusung calon kepala daerah.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas peneliti merumuskan permasalahan yang ingin di teliti, yakni “Faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilu kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015”

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis dan memahami faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memperkaya dan menambah pengetahuan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan koalisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemenangan pemilukada, serta sebagai tambahan kajian khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan

- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan informasi untuk penelitian selanjutnya tentang faktor kemenangan koalisi dalam pilukada.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sumber informasi atau bahan masukan bagi semua partai politik dan pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam pemenangan pilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.
 - 2) Dapat dijadikan referensi atau pedoman bagi penelitian selanjutnya tentang faktor kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemenangan pemilu secara umum dan pemenangan pilukada secara khusus.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai faktor kemenangan koalisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilu kepala daerah di Kabupaten Bantul, diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menentukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemenangan koalisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pilukada di daerah-daerah lainnya. Berikut akan dijelaskan beberapa kajian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini, antara lain yakni :

Tabel I.2. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil
1	Fitriyah, Hermi Susiatianingsih dan Supratiwi tentang <i>Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilu di Kabupaten Batang 2011</i>	Faktor determinan kemenangan kandidat antara lain : (1) Tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya tinggi, (2) Keputusan memilih pemilih di Kabupaten Batang di dasari oleh pilihan pribadi, (3) Faktor figur dan ketokohan memainkan peran penting dalam membuat keputusan memilih, (4) Figur calon pasangan sangat signifikan berpengaruh terhadap hasil suara, dan (5) Faktor sosiologis dan psikologis juga berperan namun tidak secara signifikan
	Sofyan A Jusuf, Mashuri Maschab (2007) tentang Studi tentang strategi politik pasangan Bandjela Paliudju dan Achmad yahya dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Gubernur Sulawesi tengah tahun 2006	Hasil kemenangan pemilu di Sulawesi tengah tahun 2006 tersebut sepenuhnya disebabkan karena adanya strategi politik yang dirancang dan diterapkan oleh pasangan calon yakni strategi memperluas dukungan partai politik dan konsistutennya, strategi pencitraan figur politik, serta strategi kampanye.
3	Susilo Utomo (2013) tentang Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memenangkan Pasangan Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmoko Pada Pilgub Jateng 2013	Peran PDIP dalam pemenangan pasangan Ganjar Pranowo – Heru sudjatmoko memiliki tingkatan yang kuat yakni sebagai perekrut politik, mesin pengumpul suara dan sebagai penggerak basis massa atau mobilisasi massa.
4	Muchammad Ichsan Saputra, Bambang Santoso Haryono, Mochammad Rozikin (2013) tentang Marketing Politik Pasangan Kepala Daerah dalam Pemilukada (Studi Kasus Tim Sukses Pemenangan Pasangan Abah Anton dan Sutiaji dalam Pemilu Kota Malang 2013)	Marketing politik yang telah dilaksanakan oleh tim sukses dalam pemenangan pasangan Abah Anton dan Sutiaji, yaitu pembentukan <i>figure</i> dan program-program kampanye yang kompleks mencakup dari penentuan produk politik, <i>promotion</i> , <i>place</i> , <i>price</i> , dan segmentasi pemilih.
5	Nehemia Syalom Ginting (2013) tentang Marketing Politik dalam Pemilu Kabupaten Karo tahun 2010	Keberhasilan strategi politik yang diterapkan oleh tim pemenangan pasangan Kena Ukur Surbakti – Terkelin Brahmana antara lain : (1) Tim pemenangan pasangan ini memperkuat basis marketing politik kedaerah mayoritas adalah pemilih tradisional yakni daerah pedesaan. (2) Tim pemenangan pasangan ini menonjolkan etnitas sebagai isu utama untuk menarik dukungan dari masyarakat

Adapun road map penelitian ini sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan. Bab ini mendeskripsikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II, Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Pada bab ini mendeskripsikan Kerangka Dasar Teori yang digunakan, Definisi Konseptual, dan Definisi Operasional.

BAB III, Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengambilan Sampel, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB IV, Deskripsi Objek Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan mengenai wilayah penelitian dan objek penelitian yang di gunakan oleh peneliti.

BAB V, Pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Faktor Kemenangan Koalisi Pasangan Suharsono-Halim dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015.

BAB VI, Penutup. Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, kesimpulan dari penelitian, saran dan rekomendasi.

E. Landasan Teori

1. Koalisi Partai Politik

Teori koalisi partai telah lama berkembang di negara-negara yang menggunakan sistem parlementer. Dalam ranah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih yang memiliki tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Pemerintahan yang kuat bisa diartikan sebagai pemerintahan yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen.

Sampai saat ini koalisi yang tercipta antara partai politik tidak ada yang ideal, tidak ada satupun koalisi yang digalang para elit menghasilkan paduan yang sesuai dengan hakikatnya. Menurut Arend (1995:221) Koalisi partai politik dapat dimaknai dengan upaya penggabungan kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, memfokuskan pada tujuan diluar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota.

Pada negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang multi partai, Bambang Cipto (2000:22) mendeskripsikan definisi koalisi yakni suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat sebuah koalisi ialah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomus*), dan tahan lama (*durable*).

a. Jenis-jenis Koalisi

Efriza (2012) mengacu pada teori Arend Lijphart mengemukakan dengan jelas beberapa bentuk koalisi berdasarkan jenisnya, antara lain :

1) Koalisi Berbasis Ideologi

Teori koalisi berbasis ideologi berfokus pada pentingnya kesamaan ideologi dan kebijakan partai sebagai pertimbangan dalam membentuk koalisi. Ambardi dalam de Swan (1973) menjelaskan bahwa teori ini menyatakan bahwa para politikus umumnya ingin meninggalkan jejak ideologi dan kebijakan

partai di pemerintahan. Politikus ini tidak menjadikan jabatan kabinet sebagai tujuan akhir, melainkan sekedar sarana untuk menerapkan kebijakan tertentu.

Karena memilih dan mempertahankan kebijakan terbaik menjadi dorongan utama, maka pertalian ideologis menjadi dasar pembentukan koalisi. Oleh Karena itu, besar kecilnya koalisi tidak menjadi kriteria utama dalam merangkul atau mengesampingkan satu partai.

2) Koalisi Kemenangan Minimal (*miminal-winning coalition*)

Teori ini menyatakan prinsip dasar koalisi berada pada maksimalisasi kekuasaan dan meraih jabatan pemerintahan sebanyak mungkin. Teori kemenangan minimal ini beranggapan bahwa duduk di pemerintahan merupakan tujuan pokok partai karena akan memberi peserta koalisi keuntungan dari segi politik dan material. Hal ini dilakukan dengan cara mencari sebanyak mungkin partai politik yang memperoleh kursi di kabinet dengan menghitung kemungkinan pemenangan suara terbanyak, yakni $50\% + 1$. Biasanya peserta koalisi akan berhenti menjadi rekan baru ketika perolehan kursi parlemen 50 persen telah terlampaui.

Kondisi ini dikemukakan oleh Ambardi dalam Riker (1962:33) yang menjelaskan bahwa peserta koalisi akan membentuk koalisi seminimal mungkin asal menjamin kemenangan dalam persaingan, dan tidak akan menambah peserta lagi. Dengan demikian keuntungan politik yang didapat dapat di distribusikan secara maksimal kepada peserta

koalisi. Secara singkat peserta koalisi hanya berfokus pada suara yang dibutuhkan guna memenangkan pertarungan politik.

3) Minimal Range Coalition

Dasar dari pelaksanaan koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet dalam sebuah pemerintahan.

4) Minimum Size Coalition

Koalisi ini merupakan Partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk bergabung demi sekadar mencapai suara mayoritas.

5) Bargaining Proposition

Merupakan koalisi dengan jumlah anggota partai paling sedikit untuk memudahkan proses negosiasi dalam pemerintahan dan dalam pembentukan kebijakan. Dasar dari teori ini dilaksanakan adalah untuk memudahkan proses tawar-menawar dan negosiasi karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit.

b. Cara Terbentuknya Koalisi

Menurut Evriza (2012), suatu koalisi dapat terbentuk melalui beberapa cara, yakni :

- 1) Bermula dengan satu pendiri (*founder*).
 - 2) Mencapai massa kritis (*critical mass*).
 - 3) Mengajak yang paling lemah untuk mendukung (*weak ties can be strong*).
-

4) Membentuk diam-diam dan membubarkan secepatnya

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Huntington dalam Rahman (2007:285), mengemukakan definisi dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, seperti memilih seorang pemimpin atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kegiatan tersebut antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan sebuah kebijakan, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam sebuah pemilihan umum.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam dalam proses politik ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Paige (1971:810-820) membagi partisipasi menjadi empat tipe. Adapun tipe tersebut antara lain :

- 1) **Partisipasi Cenderung Aktif** merupakan kondisi yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi.
 - 2) **Partisipasi Cenderung Pasif - Apatis (tertekan)** merupakan kondisi dimana seseorang atau masyarakat yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah.
-

- 3) Militan Radikal**, yakni kondisi yang dimiliki seseorang atau masyarakat apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.
- 4) Partisipasi Tidak Aktif (pasif)**, kondisi ini terjadi apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi.

Kedua faktor di atas tidaklah berdiri sendiri (variabel independent) melainkan dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti status sosial (kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan), status ekonomi yakni kedudukan seseorang berdasarkan kepemilikan kekayaan, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

3. Modalitas

Piere Bourdieu (1986) membagi modal dalam empat bentuk, yakni modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada modal politik, modal sosial dan modal budaya. Menurutnya definisi dari modal itu sangat luas dan mencakup hal-hal yang bersifat material (dapat memiliki nilai yang simbolik), serta modal budaya (yang dikategorikan sebagai minat bernilai budaya dan pola-pola konsumsi).

Dalam proses pelaksanaan pemilu, kandidat yang kemungkinan akan memenangkan pemilu jika ia memiliki modalitas yang terbangun. Modal utama yang harus dimiliki oleh kandidat yang ingin maju ialah modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah akan berpeluang besar

memenangkan dan terpilih apabila memiliki akumulasi lebih dari satu modal, asumsinya semakin besar pasangan calon mampu mengakumulasikan ketiga modal itu, maka semakin besar peluang untuk terpilih sebagai kepala daerah.

Berikut akan dijelaskan beberapa tipe modal utama yang harus dimiliki kandidat yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pemilu langsung, modalitas tersebut yakni :

1) Modal Politik

Menurut A. Hick dan J. Misra (1993) ia menyampaikan bahwa modal politik merupakan fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk dapat merealisasikan hal-hal yang dapat membantu mewujudkan kepentingan. Jadi pada intinya, modal politik merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, kekuasaan tersebut bisa dioperasikan atau dapat berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Casey dalam Sudirman Nasir (2009) menjelaskan bahwa definisi modal politik digunakan untuk pendayagunaan keseluruhan modal yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik guna menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan dapat memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan.

2) Modal Sosial

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang bisa digunakan sebagai investasi untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama didalam kelompok. Dalam buku *The Form of Capital*, Pierre Bourdieu (1986) mengemukakan definisi dari modal sosial merupakan sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang,

dimana berasal dari jaringan sosial yang terlembaga. Bourdieu juga menegaskan tentang model sosial sebagai sesuatu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya baik dari segi ekonomi, budaya maupun bentuk modal sosial lainnya berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya.

Sumberdaya sosial tersebut dapat dikategorikan seperti tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di lingkungan masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda, profesi dan sebagainya). Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan pemenangan pemilukada, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

3) Modal Budaya

Penggunaan istilah modal budaya ini pertama kali di kemukakan oleh Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron dalam "*Cultural Reproduction* dan *Social Reproduction* (1973). Modal budaya merupakan sebuah konsep sosiologi yang mendapatkan popularitas tinggi sejak konsep ini di kemukakan oleh Pierre Bourdieu.

Menurutnya modal budaya merujuk kepada aset bukan fiskal yang melibatkan ilmu pendidikan, sosial dan intelektual. Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Modal budaya juga merupakan pengetahuan atau selera yang memiliki nilai secara budaya dan pola-pola konsumsi. Modal ini juga menjadi penentu kedudukan sosial seseorang, dimana cita rasa ditentukan secara sosial.

Modal budaya merupakan dimensi yang lebih luas dari habitus. Individu memperoleh modal ini sejak ia kecil dimana modal ini sudah terbentuk dan terinternalisasi secara sendiri, salah satunya melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa modal budaya ini dibentuk sendiri oleh lingkungan sosial yang beranekaragam serta pendidikan yang diperoleh individu tersebut, pendidikan tersebut bisa berupa pendidikan formal maupun warisan budaya dari keluarga.

Individu tersebut dapat memahami tentang modal budaya secara tidak sadar, karena dengan cara itulah kondisi ini akan berfungsi secara optimal. Dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, hasil pemikiran Bourdieu memberikan manfaat secara signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis kesenjangan sosial-budaya ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat, karena modal budaya dan habitus dapat membantu memberi pencerahan terhadap bentuk dan struktur budaya.

Kondisi ini sesuai dengan masyarakat di Indonesia yang sangat mengenal apa yang dinamakan kelas sosial, dimana individu yang memiliki status sosial lebih tinggi jauh lebih dihormati dan dikenal dari pada individu yang memiliki status sosial biasa maupun rendah.

4) Modal ekonomi

Dalam pelaksanaan pemilu pada setiap pasangan maupun koalisi partai politik pasti mempersiapkan modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan atas dana politik tersebut.

Definisi dari modal politik diawali dari adanya pemahaman terhadap barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis yang disebut sebagai uang/mata uang. Kalau dilihat dari segi ekonomi, modal bisa berupa hasil investasi yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain, kemudian ditukarkan dengan keuntungan baik berupa barang atau uang/jasa politik.

Modal ekonomi memiliki peranan yang sangat penting sebagai roda penggerak dan memperlancar mesin politik yang digunakan. Dalam musim pemilihan umum, dana yang dibutuhkan pada umumnya berada dalam angka yang besar. Uang tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan kampanye seperti mencetak baliho, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi syarat utama saat calon tersebut bukan berasal dari partai politik yang dicalonkannya.

Sahdan dan Haboddin (2009) menambahkan bahwa setiap proses penyelenggaraan pilkada membutuhkan “dana politik” untuk memenuhi biaya dari kegiatan tersebut. Istilah dana politik ini dapat dibedakan berdasarkan sumber dana dan penggunaan, yaitu :

- a. Dari sumbernya, dana ini bersumber dari sumbangan pasangan calon, sumbangan dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan.
 - b. Dari sisi pengguna, dana digunakan untuk membiayai aktivitas rutin partai politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pilkada, penggunaan dana politik tidak hanya untuk pengeluaran kampanye seperti pencetakan brosur, konvoi, biaya transport, konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan.
-

Melainkan juga untuk membayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat.

Hal inilah yang mendasari mengapa dana politik yang digunakan sangat mahal, karena pelaksanaan pemilu/kada sejak persiapan, kampanye, hingga proses pemungutan suara serta pemberian dana politik lainnya membutuhkan uang.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang menjadi perwakilan intensitas atau frekuensi, peneliti langsung menggunakan dirinya sebagai perangkat penelitian, mengupayakan dengan maksimal kedekatannya dengan objek ataupun subjek penelitiannya.

Metode penelitian ini digunakan oleh peneliti memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta dan fenomena yang di temukan dalam menentukan faktor kemenangan pasangan Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilu/kada Kabupaten Bantul tahun 2015, menyuguhkan dengan apa adanya tanpa ada rekayasa dari peneliti dan sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan oleh peneliti yakni :

1. Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden berupa keterangan masyarakat
-

sebagai partisipan dalam pemilukada, serta keterangan dari masing-masing partai koalisi yakni PKB, PKS, Partai Gerinda dan Partai Demokrat terkait faktor kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam pemenangan Pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yakni, buku-buku, artikel ilmiah, website, jurnal, rujukan tesis terdahulu, catatan-catatan, koran dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti meliputi hasil perolehan Pilkada Kabupaten Bantul per kecamatan tahun 2015 dari KPU Kabupaten Bantul, dan dokumen dukungan koalisi partai politik dari tim pemenangan pasangan, serta dokumentasi pemenangan koalisi Suharsono-Halim dari tim pemenangan pasangan maupun dari KPU Kabupaten Bantul.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti langsung terlibat dalam prosesnya dan mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini adapun pihak yang akan di wawancarai adalah pengurus partai yang tergabung dalam sebuah koalisi yakni Darwinto selaku Sekertaris DPC Partai Gerindra, Subhan Nawawi selaku wakil ketua DPC PKB, Nur Rohmat selaku ketua DPC Partai Demokrat dan Amir selaku ketua DPC PKS, M. Johan Komara selaku ketua KPU Kabupaten Bantul, Titik Istiyawatun Khasanah selaku

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Humas, serta Arif Widayanto selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bantul.

Dalam penelitian ini metode dokumen ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian, yang dilakukan dengan cara mengambil data statisti. Dokumen tersebut meliputi SK pembentukan koalisi yang di dapat dari tim pemenangan, hasil perhitungan suara setiap kecamatan yang di dapat dari KPU Kabupaten Bantul, buku Proses Pelaksanaan Pemilukada dari KPU, serta dokumen dukungan koalisi dari masing-masing partai yang digunakan untuk mengolah data dan menentukan faktor kemenangan pasangan Suharsono-Halim pada pemilukada tahun 2015.

D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan diolah menjadi data yang siap untuk disajikan, pengolahan data tersebut dilakukan dengan metode triangulasi, reduksi, penyajian data serta kesimpulan.

1) Triangulasi

Menurut Rahardjo (2010) dalam web UIN Malang, menjabarkan bahwa triangulasi merupakan teknik pengolahan data dengan pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan multi metode yang dilakukan peneliti saat mengumpulkan serta menganalisis data.

2) Reduksi

Reduksi merupakan teknik pengolahan data dengan merangkum, memilih dan menentukan hal-hal pokok ataupun poin-poin penting yang didapatkan dari penelitian. Dengan tahapan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data yang di peroleh.

3) Penyajian Data

Setelah tahapan reduksi selesai, tahapan selanjutnya yang digunakan ialah penyajian data. Dimana penyajian data ini di susun berbentuk teks dan bersifat narasi yang menggambarkan hasil dari penelitian tersebut. Data disajikan dengan mengelompokkan sesuai dengan sub-sub penelitian.

4) Kesimpulan

Tahapan terakhir yang dilakukan peneliti setelah melakukan penyajian data ialah penarikan kesimpulan. Dengan penjabaran berbagai data yang ada dan pengolahannya yang menggunakan berbagai tahapan peneliti dapat langsung menentukan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai penutup dalam penelitian yg dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Koalisi Partai Politik

Pada pelaksanaan sebuah pemilihan umum pasangan calon pemimpin akan diusung dan didukung oleh partai politik yang tergabung dalam sebuah koalisi. Koalisi yang mengusung pasangan Suharsono-Halim terdiri dari PKB, Partai Gerindra dan didukung oleh PKS serta Partai Demokrat.

Koalisi yang dibangun oleh pasangan Suharsono-Halim pada dasarnya memiliki ideologi yang berbeda-beda, dimana partai PKB dan PKS merupakan partai dengan Ideologi Islam (partai agamis), partai Gerindra merupakan partai dengan ideologi Nasionalis serta partai Demokrat merupakan partai dengan ideologi Nasionalis agamis.

Selain keempat partai ini yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Suharsono-Halim, koalisi ini di dukung partai lain yakni PAN, Partai Golkar, sebagian PAC PDIP dan PPP. Dimana partai tambahan tersebut membentuk relawan sendiri dalam upaya pemenangan suara. PAN membentuk relawan yang dinamakan Relawan Hijau, PPP dan Partai Golkar membentuk relawan yang dinamakan Relawan Perubahan, sedangkan 14 PAC PDIP membentuk relawan yang dinamakan relawan Jas Merah.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan adanya korelasi antara teori yang digunakan, peneliti mengemukakan bahwa koalisi yang digunakan oleh pasangan Suharsono-Halim cenderung menggunakan koalisi kemenangan minimal. Berdasarkan teori Evriza (2012) yang menjelaskan bahwa partai-partai politik bergabung membentuk koalisi dengan menghitung kemungkinan pemenangan suara terbanyak, yakni $50\% + 1$ suara.

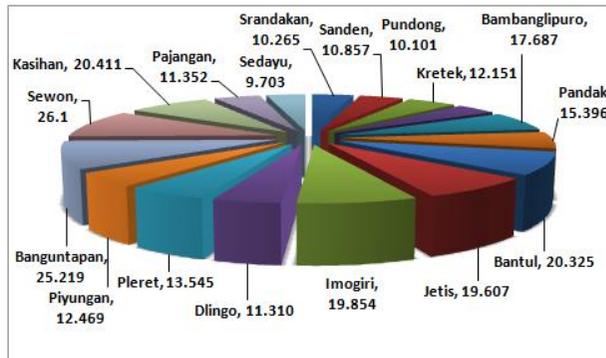
Hal ini diperkuat dengan hasil dari pemilu legislatif bahwa partai Gerindra memperoleh suara sebesar 75.514 suara sah atau 6 kursi di legislatif, sementara PKB memperoleh suara sebesar 57.523 suara sah atau 4 kursi di legislatif. Apabila jumlah partai ini diakumulasikan, maka total perolehan kursi ialah sebesar 10 kursi di legislatif, jumlah ini sudah memenuhi standar minimum jumlah kursi legislatif. Sesuai

dengan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan, dimana pasangan Bupati dan wakil Bupati bisa di dukung oleh partai politik yang memiliki minimal 9 kursi di DPRD.

Pada awalnya koalisi pendukung pasangan Suharsono-Halim hanya menargetkan kemenangan di 10 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul atau sejumlah 60% dari total keseluruhan. Kondisi ini disebabkan karena pihak lawan merupakan pasangan petahana (*incumbent*) yang sangat kuat sekali, dan pasangan ini juga diusung oleh partai-partai yang memiliki total kursi terbanyak di DPRD kabupaten bantul dengan perolehan kursi di DPRD sejumlah 12 kursi untuk PDIP dan 2 kursi untuk partai Nasdem.

Setelah penghitungan suara dari pemilikada terkumpul, pasangan Suharsono-Halim ini mendapatkan suara terbanyak di 15 kecamatan di Kabupaten Bantul. Kondisi ini di sebabkan karena koalisi ini menggunakan metode pemenangan berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga kemenangan pasangan Suharsono-Halim bisa secara cepat di prediksi.

Perolehan suara tertinggi pasangan Suharsono-Halim berada di Kecamatan Sewon dengan perolehan suara sejumlah 26.100 suara sah. Hal ini di sebabkan karena banyaknya kader-kader partai koalisi yang berdomisili di wilayah ini yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih Suharsono-Halim. Berikut grafik perolehan suara pasangan Suharsono-Halim di setiap kecamatan di Kabupaten Bantul pada pemilukada tahun 2015.



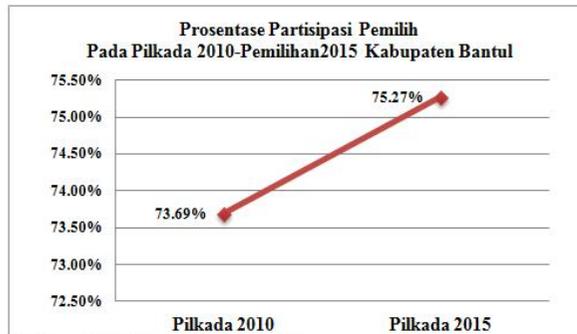
Gambar 1. Grafik Perolehan Suara Suharsono-Halim Di setiap Kecamatan pada Pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015

B. Partisipasi Politik

Dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Bantul tahun 2015, KPU Kabupaten Bantul menargetkan presentase partisipasi pemilih sebesar 77,5%. Angka ini sudah sesuai dengan angka yang ditentukan oleh KPU RI secara nasional. Dari target yang sudah ditetapkan tersebut yakni sejumlah 77,5% dengan upaya yang sudah dilakukan secara maksimal, partisipasi pemilih di pada pemilukada Kabupaten Bantul hanya mencapai 75,72%. Angka ini memang berada dibawah target yang ditentukan oleh KPU RI, namun angka partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul ini telah berada diatas rata-rata angka partisipasi di level nasional.

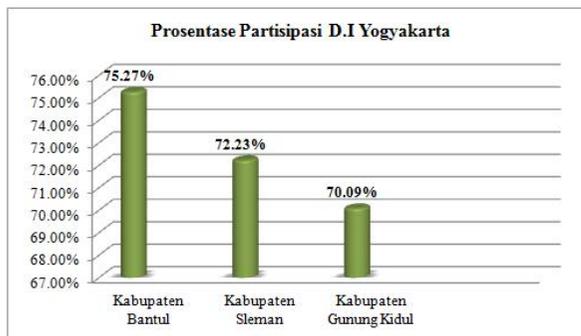
Dibandingkan dengan pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2010, partisipasi pemilih mengalami peningkatan. Kondisi ini juga dialami oleh dua kabupaten lain yang mengikuti pemilukada tahun 2015 di DIY, yakni Kaabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul juga

menempati posisi tertinggi. Grafik presentasi partisipasi pemilih akan dijelaskan dalam grafik berikut :



Sumber : KPU Kabupaten Bantul 2016

**Gambar 2. Grafik Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2010-
Pemilihan 2015 Kabupaten Bantul**



Sumber : KPU Kabupaten Bantul 2016

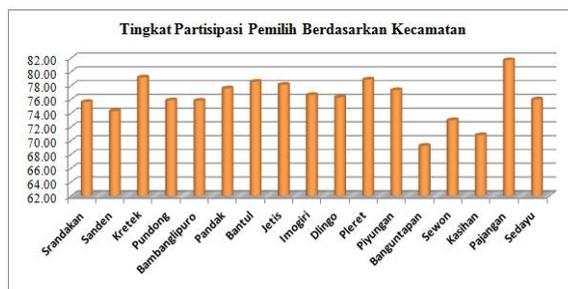
Gambar 3. Grafik Partisipasi Pemilih di DIY

Kenaikan tingkat partisipasi masyarakat ini disebabkan banyak faktor, salah satunya ialah keinginan masyarakat untuk membawa Bantul kearah yang lebih baik dengan ikut serta dalam pilukada tahun 2015, adanya kejenuhan yang dialami masyarakat dengan politik dinasti yang terjadi di Kabupaten bantul, kondisi sosial, dan ekonomi, serta karakteristik kandidat pasangan calon dengan melihat

visi misi juga menjadi salah satu alasan untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk memilih

Kondisi ini juga dirasakan sampai level kecamatan, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, tingkat partisipasi di Kecamatan Pajangan menempati urutan tertinggi yakni di angka 81,69% dan kecamatan banguntapan berada di urutan terendah yakni di angka 69,72%. Berikut grafik tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bantul per kecamatan :

Gambar 3. Grafik Partisipasi Pemilih di DIY



sumber : data KPU Kabupaten Bantul 2015

Gambar 4. Grafik Tingkat Partisipasi Pemilih berdasarkan Kecamatan

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Bantul ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemenangan pasangan Suharsono-Halim karena masyarakat percaya terhadap isu perubahan yang diusung pasangan Suharsono-Halim

C. Modalitas

Dalam pemenangan pilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 pasangan Suharsono-halim sudah memiliki modal awal yang cukup membantu kemenangan baik dari segi politik, sosial, dan budaya. Modal ini digunakan oleh koalisi partai politik untuk dapat

meningkatkan kredibilitas dan citra dari pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang akan mereka usung. Modal awal yang dimiliki oleh pasangan ini tergolong cukup banyak dan sangat berpengaruh. Adapun keseluruhan modal tersebut dijelaskan dalam masing-masing variabel berikut :

1) Modal Politik

Koalisi pasangan Suharsono-Halim agar dapat terpilih dalam pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Bantul harus bisa melihat peluang politik maupun isu politik yang ada pada masyarakat setempat. Apakah peluang politik tersebut bisa diangkat menjadi isu yang nantinya akan dibawa saat proses kampanye, dimana hasil dari penyampaian program kampanye tersebut akan memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk dapat memilih pasangan tersebut.

Pasangan Suharsono-Halim mampu melihat peluang politik dari kejenuhan yang dirasakan oleh Masyarakat Bantul, dimana sudah terlalu lama Bantul dipimpin oleh Dinasti Samawi dan tidak ada perkembangan signifikan yang mereka rasakan. Peluang politik seperti ini tidaklah menjadi penghambat dalam kemenangan pasangan Suharsono-Halim, melainkan bisa menjadi modal utama dalam program kampanye. Koalisi ini mengusung slogan PERUBAHAN dan adanya pola intelegen yang dibentuk oleh partai koalisi pasangan Suharsono-Halim mempermudah mereka dalam meraih kemenangan.

Selain itu modal politik yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim ialah adanya kekuatan dan jaringan dari koalisi partai politik pengusungnya. Internal partai politik juga menjadi modal politik yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pemilukada. Apabila sebuah

partai politik mengalami perpecahan atau konflik maka kedepannya sudah pasti akan mempengaruhi strategi yang akan digunakan dalam koalisi partai tersebut. Salah satu contohnya dapat dilihat saat pemilukada Kabupaten Bantul berlangsung, ialah adanya perpecahan dari internal partai pengusung lawan yakni PDI-P dimana dari 17 PAC yang dimiliki DPC Kabupaten Bantul, 14 PAC beralih mendukung pasangan Suharsono-Halim dengan membentuk relawan yang dinamakan Relawan Jas Merah.

2) Modal sosial

Pada pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 ini, kredibilitas yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim sangat berpengaruh terhadap kemenangan yang mereka raih. Suharsono memiliki citra politik dan citra sosial yang cukup baik di mata masyarakat Kabupaten Bantul, karena beliau adalah seorang purnawirawan Polri yang sering mengadakan aksi sosial ataupun bantuan sosial kepada masyarakat Bantul jauh sebelum ia mencalonkan diri jadi calon Bupati.

Selain itu Suharsono juga merupakan sosok yang cukup ternama di kalangan warga Nahdatul Ulama (NU) di Kabupaten Bantul, dimana NU merupakan basis organisasi dan basis massa yang kuat. Kondisi ini juga di dukung oleh keanggotaannya dalam organisasi di NU, hampir seluruh keluarga dari Suharsono merupakan anggota NU. Dengan adanya modal sosial ini mempermudah mereka untuk mendapatkan suara yang cukup banyak

3) Modal budaya

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa modal budaya lahir secara otomatis dalam diri seseorang. Budaya dipengaruhi oleh keluarga,

lingkungan tempat tinggal, serta pendidikan yang dimiliki. Suharsono merupakan seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang cukup lama bertugas di Banten, dan ia juga pernah bertugas di Mabes Polri. Pendidikan militer yang dimilikinya merupakan salah satu modal politik yang cukup membantu peningkatan kredibilitasnya saat pemilukada.

Modal budaya lain yang dimiliki ialah Kedudukan yang dimiliki oleh Halim dalam organisasi NU di Kabupaten Bantul cukup tinggi, ia merupakan salah satu pengurus organisasi NU di Bantul. Dengan jabatan yang dimiliki olehnya di NU, suara dalam pemilukada Kabupaten Bantul dengan mudah diakomodir dengan adanya dukungan dari Satgas Garda Bangsa yang merupakan organisasi pemuda PKB yang paling depan dalam upaya pemenangan pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

4) Modal ekonomi

Setiap pasangan calon sudah pasti akan mempersiapkan modal ekonomi atau finansial saat ingin terjun dalam dunia Politik. Modal ekonomi ini lebih menekankan pada bagian dana politik, pada umumnya modal ekonomi digunakan untuk memenuhi kebutuhan politik saat pemilukada berlangsung, dimulai dari awal pendaftaran sampai proses pemungutan suara.

Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh KPU tersebut, modal ekonomi yang awalnya di gunakan oleh pasangan calon untuk memenuhi kebutuhan kampanye sedikit lebih berkurang. Pasangan calon Bupati dan Wakil bupati serta koalisi pasrtai politik yang

mengusung tetap mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk pelaksanaan pemilukada.

Berdasarkan undang-undang No 8 Tahun 2015 yang kemudian diturunkan kedalam PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye, telah secara jelas mengatur tentang kewajiban KPU untuk memberikan fasilitas kampanye dalam bentuk pembuatan dan pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan jumlah tertentu

Tidak semua kegiatan atau bahan kampanye di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim suksesnya. Bahan kampanye pendukung yang dipersiapkan oleh tim sukses pasangan ini berupa stiker, kaos serta adanya fasilitas makanan yang diberikan kepada partisipan saat kampanye berlangsung.

Namun pihak tim pemenangan pasangan Suharsono-Halim menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada politik uang maupun broker serta preman politik yang di libatkan dalam pemenangan pasangan Suharsono-Halim dalam pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Faktor Kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilu kepala daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain yakni :

1. **Koalisi partai politik** Menunjukkan bahwa faktor kemenangan pasangan Suharsono-Halim pada pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 sebagian besar disebabkan karena bentuk koalisi yang dibangun oleh partai politik pendukung dan pengusung pasangan.
2. **Partisipasi Politik** Menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat berperan penting dalam faktor kemenangan koalisi pasangan Suharsono-Halim dalam pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 karena tingkat partisipasi di Kabupaten Bantul meningkat dari pemilukada tahun 2010.

3. **Modalitas**

a. **Modal politik**

Modal politik yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim dalam kemenangan pemilukada kabuapten Bantul meliputi kemampuan membaca isu politik, memahami dinamika politik, dan adanya koalisi partai dan relawan yang konsisten dalam mendukung pasangan Suharsono Halim di pemilukada

b. **Modal sosial**

Menunjukkan bahwa faktor kemenangan koalisi pasangan Suharsono-Halim dalam kemenangan pemilukada tahun 2015 disebabkan karena memang memiliki modal sosial yang meliputi basis massa yang terdiri dari keluarga, organisasi-organisasi masyarakat yang berhasil dirangkul, dan ketokohan yang dimiliki, dimana Suharsono dan Halim merupakan bagian dari pengurus dari Nahdatul Ulama (NU) yang menjadi basis masa di Kabupaten Bantul.

c. Modal budaya

Menunjukkan bahwa faktor kemenangan koalisi pasangan Suharsono-Halim dalam pemenangan pilukada tahun 2015 disebabkan karena memiliki modal budaya, latar belakang pendidikan militer yang dimiliki oleh Suharsono menjadi salah satu modal yang tergolong kuat. Didukung pula oleh riwayat Halim yang merupakan ketua DPC PKB Kabupaten Bantul, dan ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD di Provinsi DIY.

d. Modal ekonomi

Menunjukkan bahwa faktor kemenangan koalisi pasangan Suharsono-Halim dalam pemenangan pilukada tahun 2015 disebabkan karena memang memiliki modal ekonomi. Modal ekonomi ini digunakan untuk biaya operasional kampanye serta memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, namun bukan dalam bentuk politik uang

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
 - [2] Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*, IPD, Yogyakarta, 2009
 - [3] Sudirman Nasir, *SBY Antara Modal Politik Dan Modal Simbolik*, dalam <http://pemilu.liputan6.com/kolom>
 - [4] Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel : Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
 - [5] Rahman, A.H.I., *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
 - [6] Evriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, New York: Free Press, 2012.
-